

MANAJEMEN KOLABORASI DALAM RANGKA RESOLUSI KONFLIK DI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

(Collaborative Management for Conflict Resolution in Kelimutu National Park)

LUKITA AWANG NISTYANTARA¹⁾, SAMBAS BASUNI²⁾, DAN RINEKSO SOEKMADI³⁾

¹⁾ Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor

^{2,3)} Bagian Manajemen Kawasan Konservasi Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata,
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Diterima 18 Maret 2011/Disetujui 5 April 2011

ABSTRACT

The management of Kelimutu National Park (KNP), who applied preservationist paradigm and centralized policy, had caused a conflict of interest among stakeholders. Therefore, the management strategies of the park by co-management approach were needed to conserve the park and resolve the conflict. The aims of this research were to analyze the application of the principle of co-management at the time, to identify relevant stakeholders, and to determine the management strategies of the park through co-management approach. The results showed that application of the principle of co-management in the Wologai Tengah village fell in the high/good category, while those applied in the Saga village fell in the category of middle. The results also showed that there were 15 (fifteen) stakeholders who were or could be affected by the decisions and the actions of the park's management. Based on the expert's assessment, the cores of the stakeholders were both the park management and the local community. They could influence the successful management of the park. The management strategies of the park was to implement some activities in the following priorities: 1) conduct a continuous meeting among the core stakeholders, provide assistance to increase the community of economic business, and conduct the KNP conservation extension; 2) coordinate stakeholders forum, establish stakeholders agreement, and conduct socialization of the programs.

Keywords: co-management, Kelimutu National park, conflict, collaboration management

PENDAHULUAN

Pengelolaan Taman Nasional Kelimutu (TNKL) masih menerapkan paradigma *preservationist* yang terfokus pada sistem ekologi serta kebijakan sentralistik yang mengakibatkan seringkali keputusan yang diambil oleh pengelola taman nasional tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Akibat dari paradigma dan kebijakan tersebut, memicu munculnya konflik kepentingan antar *stakeholders* di dalam pengelolaan kawasan TNKL. Konflik tersebut juga memungkinkan terjadinya degradasi sumberdaya alam dalam kawasan TNKL.

Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dan mengatasi konflik, maka diperlukan upaya pendekatan penyelesaian masalah melalui perencanaan strategi pengelolaan yang tepat. Untuk itu, diperlukan analisis kepentingan, pengaruh dan kebutuhan *stakeholders*, dalam rangka mensinergikan upaya-upaya pengelolaan oleh pengelola taman nasional. Strategi pengelolaan perlu disusun melalui pendekatan *co-management* (Borrini-Feyerabend *et al.* 2000), sehingga nantinya akan diperoleh strategi pengelolaan kawasan yang memungkinkan untuk diterapkan dan akuntabel.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *co-management* dalam pengelolaan TNKL pada saat ini, mengidentifikasi serta menganalisis kepentingan (*interest*) dan aspirasi *stakeholders* terkait pengelolaan TNKL, mengklasifikasi *stakeholders*, dan menentukan

strategi pengelolaan TNKL melalui pendekatan *co-management*.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2010. Observasi dan survey lapangan dilakukan di dua desa dengan jumlah responden sebanyak 60 orang dengan cara wawancara mendalam menggunakan kuisioner sebagai panduan (Colfer *et al.* 1999). Teknik *snowball sampling* digunakan untuk melakukan analisis *stakeholders* (Reed *et al.* 2009). Selanjutnya dilakukan penilaian sub elemen pengelolaan oleh 10 pakar untuk menentukan strategi pengelolaan TNKL dengan teknik *Interpretative Structural Modeling - ISM* (Marimin 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Co-management* dalam Pengelolaan TNKL pada Saat Ini

Dalam rangka menyusun strategi pengelolaan TNKL, perlu diketahui terlebih dahulu sejauh mana penerapan prinsip *co-management* dijalankan dalam pengelolaan TNKL. Prinsip dasar yang dimaksud yaitu partisipasi *stakeholders*, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, adanya proses negosiasi, kejelasan hak

dan tanggung jawab *stakeholders*, serta adanya konsensus yang disepakati *stakeholders* inti.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNKL di Desa Wologai Tengah tergolong tinggi, sedangkan di Desa Saga memperlihatkan partisipasi yang sedang. Partisipasi masyarakat yang tinggi di Desa Wologai Tengah mengindikasikan bahwa penerapan prinsip *co-management* dalam pengelolaan TNKL pada saat ini sudah berjalan.

Dalam pengelolaan TNKL, telah ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang bermukim di Desa Wologai Tengah, terbukti dengan persentase responden yang menyatakan bahwa telah ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat di desa tersebut tergolong tinggi. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat di Desa Wologai Tengah memberikan dampak positif terhadap kelestarian fungsi ekosistem TNKL, dengan tidak adanya kegiatan perambahan kawasan.

Hal ini berbeda dengan kondisi di Desa Saga yaitu persentase responden yang menganggap hak masyarakat adat belum diakui oleh pihak BTNKL tergolong tinggi. Hal ini dapat diketahui dengan berbagai usulan dan pendapat yang diajukan oleh masyarakat setiap penyuluhan dan koordinasi yang dilaksanakan oleh pihak BTNKL. Mereka mengusulkan perlunya pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas sebagian lahan yang berada dalam kawasan TNKL.

Keberhasilan pelaksanaan negosiasi di Desa Wologai Tengah cukup tinggi, sementara di Desa Saga sedang. Keberhasilan proses negosiasi di Desa Wologai Tengah dikarenakan keterlibatan aktif ketua adat/*mosalaki* Wologai dan kepala desa. *Mosalaki* dan kepala desa sangat kuat mempengaruhi BTNKL agar turut melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa hak dan tanggung jawab *stakeholders* dalam pengelolaan TNKL di Desa Wologai Tengah telah jelas dan diatur dalam konsensus yang tidak tertulis. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan walaupun mereka tidak terlibat dan tergabung dalam keanggotaan Pam Swakarsa. Tanggung jawab yang diperlihatkan oleh masyarakat Wologai Tengah tersebut memberikan gambaran bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengamanan merupakan implikasi dari kejelasan hak yang diberikan kepada masyarakat, yaitu mereka berhak memanfaatkan sumber air bersih dari dalam kawasan, serta mengelola *camping ground* dan kolam pemancingan yang pembangunannya difasilitasi oleh pihak BTNKL dan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat tersebut akan meringankan beban biaya yang dibutuhkan karena para *stakeholders* saling bahu membahu menyumbangkan sumberdaya termasuk informasi maupun tenaga yang dimilikinya. Hal ini merupakan salah satu sasaran yang diharapkan dalam pengelolaan kawasan dengan pendekatan *co-management* agar fungsi ekosistem kawasan TNKL dapat terjaga.

Sementara itu, jumlah responden di Desa Saga yang menyatakan telah ada kejelasan dalam kegiatan pengelolaan, cukup berimbang dengan responden yang menyatakan belum ada kejelasan. Jumlah yang berimbang tersebut menunjukkan bahwa peluang konflik kepentingan antara masyarakat setempat dengan pihak BTNKL masih mungkin terjadi. Hal ini berarti bahwa konsep *co-management* sudah diterapkan namun belum mencapai tingkat saling percaya antar *stakeholders*.

Penerapan prinsip *co-management* yang selanjutnya dianalisis dalam penelitian ini yaitu adanya konsensus yang disepakati *stakeholders* inti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan TNKL, telah ada konsensus yang disepakati antara masyarakat Desa Wologai Tengah dengan pihak BTNKL. Persentase responden yang menyatakan bahwa telah ada konsensus tidak tertulis yang disepakati bersama antara masyarakat dengan pihak BTNKL cukup tinggi. Pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat tentang keberadaan konsensus/ kesepakatan di Desa Wologai Tengah didukung oleh pernyataan tokoh adat Wologai yang mengemukakan bahwa masyarakat berkewajiban menjaga keamanan kawasan TNKL, sedangkan pihak pemerintah membantu pengembangan ekonomi masyarakat dalam hal pembiayaan, serta pihak lembaga adat menyediakan sebidang tanah ulayatnya untuk pengembangan ekonomi tersebut berupa lokasi pembangunan *camping ground* dan area kolam pemancingan.

Sementara itu, responden di Desa Saga yang menyatakan telah dan belum ada konsensus jumlahnya cukup berimbang. Kondisi yang berimbang tersebut dimungkinkan karena beberapa masyarakat beranggapan bahwa kesepakatan *torajaji* yang dibuat pada tahun 2002 telah memuaskannya, karena selain demi kelestarian kawasan dan keberlangsungan fungsi ekosistem, beberapa masyarakat telah dilibatkan dalam beberapa kegiatan pengelolaan bersama TNKL. Namun bagi masyarakat yang kurang puas dengan kesepakatan tersebut, selain karena desakan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan sehingga tetap menginginkan dilakukan kesepakatan ulang.

2. Stakeholders, Kepentingan (*interest*) dan Aspirasi

Hasil identifikasi *stakeholders* menggunakan wawancara mendalam dengan teknik *snowball* menunjukkan bahwa *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan TNKL pada lokasi penelitian sebanyak 15 *stakeholders* (Tabel 1).

Analisis kepentingan mengindikasikan bahwa sebagian besar *stakeholders* sangat berkepentingan dalam koordinasi rencana antar lembaga/ *stakeholders* dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan TNKL, serta peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat (Tabel 2).

Tabel 1. *Stakeholders* pengelolaan TNKL

No	<i>Stakeholders</i>	Keterangan
1	Petani kopi dalam kawasan	Dipengaruhi
2	Masyarakat Saga	Dipengaruhi
3	Lembaga Adat Saga	Mempengaruhi/ dipengaruhi
4	Kepala Desa Saga	Mempengaruhi/ dipengaruhi
5	Masyarakat Wologai Tengah	Dipengaruhi
6	Lembaga Adat Wologai	Mempengaruhi/ dipengaruhi
7	Kepala Desa Wologai Tgh.	Mempengaruhi/ dipengaruhi
8	BTNKL	Mempengaruhi
9	BAPPEDA	Mempengaruhi
10	Dishutbun	Mempengaruhi
11	Disbudpar	Mempengaruhi
12	Unflor	Mempengaruhi / dipengaruhi
13	Yastim	Dipengaruhi
14	Swisscontact	Dipengaruhi
15	Tananua Flores	Mempengaruhi/ dipengaruhi

Secara umum, kepentingan (*interest*) dan aspirasi *stakeholders* BTNKL, pemerintah daerah, Unflor, kepala desa, LSM dan lembaga adat Wologai telah sinergi dengan fungsi ekosistem dan program pengelolaan TNKL. Namun, kepentingan (*interest*) dan aspirasi petani kopi, masyarakat Saga dan lembaga adat Saga yang tidak sinergi dengan program pengelolaan TNKL. Ketidak sinergian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengambilan kayu untuk pembangunan rumah adat,
- 2) Kebutuhan lahan untuk berkebun dan klaim kepemilikan atas sebagian lahan dalam kawasan.

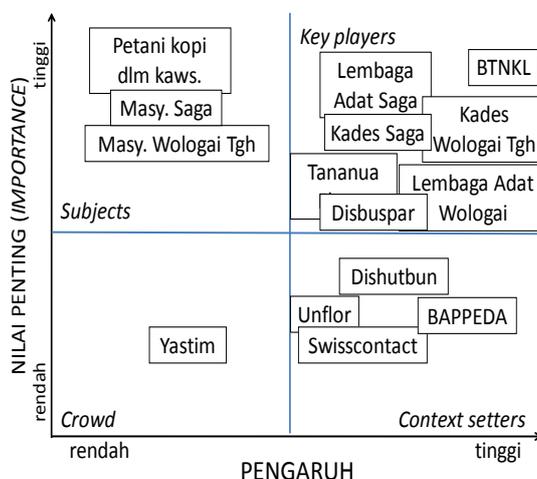
Tabel 2. Rekapitulasi hasil analisis kepentingan/ aspirasi *stakeholders*

No	Kepentingan/ aspirasi
1	Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat
2	Distribusi manfaat TNKL
3	Perluasan lapangan kerja
4	Koordinasi rencana antar lembaga/ <i>stakeholders</i> dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan
5	Pendidikan lingkungan bagi <i>stakeholders</i>
6	Pengembangan desa penyangga
7	Kontribusi ekonomi TNKL bagi pembangunan daerah
8	Keseimbangan fungsi ekosistem TNKL
9	Keberlanjutan pembiayaan pengelolaan TNKL
10	Peran serta masyarakat dalam menjaga keutuhan TNKL
11	Perencanaan bersama <i>stakeholders</i> inti

Kegiatan perambahan kawasan TNKL dimungkinkan akan mengganggu keutuhan dan kelestarian fungsi ekosistem kawasan. Luas kawasan TNKL hanya 5.356,5 Ha, sehingga perambahan kawasan yang beberapa hektar pun dapat mengganggu kelestarian kawasan, serta dimungkinkan berdampak pada fungsi Danau Kelimutu dan beberapa jenis flora dan fauna dalam kawasan TNKL.

3. Nilai Penting (*Importance*) dan Pengaruh *Stakeholders*

Pada Gambar 1 terlihat bahwa posisi kategori I (*subjects*) ditempati oleh petani kopi dalam kawasan, masyarakat Saga, dan masyarakat Wologai Tengah. Pada kategori ini ketiga *stakeholders* merupakan *stakeholders* yang penting namun memerlukan pemberdayaan agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan TNKL.



Gambar 1. Ilustrasi posisi *stakeholders* pengelolaan TNKL berdasarkan nilai penting (*importance*) dan pengaruh.

Pemberdayaan bagi *stakeholders* pada posisi *subjects* dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pada setiap tahapan pengelolaan, serta melakukan penguatan kapasitas SDM. Rishi *et al.* (2008) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan motivasi masyarakat lokal agar terlibat dalam pengelolaan dan kegiatan konservasi, sebagaimana tingginya tingkat kepentingan *stakeholders* tersebut, yaitu dengan mengupayakan penguatan pemenuhan prioritas kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan mempertahankan hidup (*survival needs*) dan kebutuhan perasaan aman (*security needs*).

Selanjutnya, kategori II (*key players*) terdiri dari *stakeholders* BTNKL, lembaga adat, kepala desa, Disbudpar dan Tananua Flores. *Stakeholders* ini memiliki posisi yang sangat penting sehingga perlu dilibatkan dalam pengelolaan sebagai mitra dan perlu untuk mempertahankan komitmennya dalam pengelolaan.

Kategori III (*context setters*) ditempati oleh lembaga Dishutbun, BAPPEDA, Unflor, serta Swisscontact. Pemerintah daerah melalui dinas terkait, memiliki otoritas yang tinggi sehubungan dengan perumusan kebijakan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Ende. Unflor dan Swisscontact berperan sehubungan dengan kemampuannya dalam memainkan peran intermediasi, penyebaran informasi dan menjalankan fungsi koordinasi. Hal ini menjadi perhatian karena *stakeholders* pada kategori III (*context setters*) tersebut berperan dalam merumuskan kebijakan dan menjembatani perumusan keputusan dan opini yang berkembang di kawasan TNKL. *Stakeholders* tersebut juga perlu dikelola untuk dimintai saran pendapat (konsultasi) ataupun hanya sekedar mendapatkan informasi pengelolaan.

Kategori IV (*crowd*) ditempati oleh Yastim, yaitu *stakeholders* yang memiliki nilai penting (*importance*) dan pengaruh yang rendah. *Stakeholders* tersebut perlu mendapatkan informasi agar tidak menjadi sumber kendala yang dapat menggagalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan TNKL ke depan.

Bentuk dan posisi nilai penting (*importance*) dan pengaruh *stakeholders* akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Reed *et al.* 2009), sehingga hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan pengelolaan TNKL ke depan. Di samping itu, dimungkinkan juga munculnya *stakeholders* baru yang belum teridentifikasi pada penelitian ini, terkait dengan dinamika sosial yang terus berkembang di lokasi penelitian.

4. Pengolahan Elemen-elemen Strategi Pengelolaan TNKL dengan Teknik ISM

Berdasarkan kajian sebelumnya, perlu penyusunan suatu strategi pengelolaan yang didasarkan pada resolusi konflik yang terjadi di TNKL, utamanya di Desa Saga. Adapun ketentuan *co-management* dalam penyusunan strategi pengelolaan pada penelitian ini mengikuti

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Analisis strategi pengelolaan TNKL melalui pendekatan *co-management* menggunakan teknik ISM dengan menentukan kelompok elemen pengelolaan yang terdiri dari elemen lembaga dan pelaku yang terlibat, elemen kebutuhan dari program, elemen kendala utama, elemen tujuan, dan elemen kegiatan yang diperlukan (Tabel 3). Masing-masing elemen memiliki beberapa sub elemen yang diperoleh berdasarkan kajian sebelumnya, pendapat pakar dan studi pustaka.

Hasil analisis dengan teknik ISM terhadap elemen lembaga dan pelaku yang terlibat menunjukkan bahwa petani kopi dalam kawasan, BTNKL, masyarakat Saga dan masyarakat Wologai Tengah merupakan elemen kunci lembaga dan pelaku yang terlibat dalam pengelolaan TNKL. Keempat *stakeholders* tersebut disebut sebagai *stakeholders* inti pengelolaan TNKL karena menjadi penggerak utama dan mempengaruhi *stakeholders* lainnya, terkait dengan pelaksanaan *co-management* dalam pengelolaan TNKL.

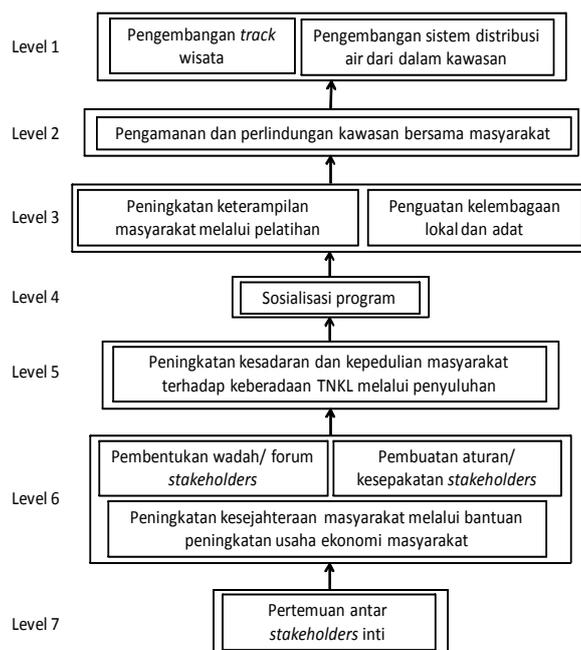
Tabel 3. Ringkasan elemen pengelolaan kunci hasil analisis ISM

No	Elemen	Sub elemen kunci
1	Lembaga dan pelaku yang terlibat	Petani kopi dalam kawasan, masyarakat Saga dan Wologai Tengah, serta pihak BTNKL
2	Kebutuhan dari program	Koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan
3	Kendala utama	Kurangnya koordinasi internal dan antar <i>stakeholders</i> inti
4	Tujuan	Menciptakan mekanisme pembelajaran dialogis, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar <i>stakeholders</i> inti, meningkatkan potensi kemitraan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
5	Kegiatan yang diperlukan	Pertemuan antar <i>stakeholders</i> inti

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa untuk keberhasilan pengelolaan TNKL secara *co-management*, kebutuhan yang perlu diperhatikan adalah koordinasi rencana antar lembaga/ *stakeholders*; kendala utama yang perlu diatasi adalah kurangnya koordinasi internal BTNKL dan antar *stakeholders* inti; serta tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan mekanisme pembelajaran dialogis, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* inti, meningkatkan potensi kemitraan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka strategi pengelolaan TNKL melalui pendekatan *co-management* adalah melaksanakan prioritas kegiatan (Gambar 2) sebagai berikut: 1) melaksanakan pertemuan antar *stakeholders* inti secara kontinyu, 2) memberikan bantuan peningkatan usaha ekonomi masyarakat, 3) membentuk wadah/ forum *stakeholders*, 4) membuat aturan/ kesepakatan *stakeholders*, serta 5) mengadakan penyuluhan dan 6) sosialisasi program.

Gambar 2 menunjukkan bahwa pertemuan antar *stakeholders* inti yang intensif memunculkan inisiatif masyarakat untuk mengusulkan jenis-jenis bantuan usaha ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Pertemuan tersebut juga secara tidak langsung menjadi wahana bagi petugas/ pihak BTNKL untuk melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan TNKL.



Gambar 2. Diagram model struktural dari elemen kegiatan yang diperlukan dalam pengelolaan TNKL melalui pendekatan *co-management*.

Dalam rangka menyelesaikan konflik, perlu dilakukan pembentukan forum *stakeholders*. Forum *stakeholders* yang terbentuk akan mengarah pada pembuatan aturan/ kesepakatan *stakeholders* serta penyusunan berbagai program dan usulan rencana kegiatan. Kesepakatan yang telah ada sebelumnya namun belum memuaskan beberapa kelompok masyarakat dapat dievaluasi dalam forum ini, sehingga tersusun kesepakatan baru yang benar-benar diakui oleh semua *stakeholders*.

Program yang telah disepakati perlu disosialisasikan. Sosialisasi program dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan penafsiran *stakeholders* atas program yang telah disepakati bersama berdasarkan kepentingan dan aspirasinya, agar tetap pada kesepakatan. Oleh karena itu sosialisasi program perlu dilakukan dengan hati-hati karena kegiatan ini dapat mensukseskan atau bahkan menggagalkan program pengelolaan. Hasil yang diharapkan yaitu bahwa pihak BTNKL bersama-sama dengan *stakeholders* akan melaksanakan sub elemen pengelolaan pada Level 3 yaitu pelatihan dan penguatan kelembagaan lokal; Level 2 yaitu pengamanan dan perlindungan kawasan; serta sub

elemen Level 1 yaitu mengembangkan *track* wisata dan mengembangkan sistem distribusi air dari dalam kawasan.

Forum *stakeholders* juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingan dan aspirasinya demi peningkatan kesejahteraan, serta guna menguatkan kelembagaan lokal dan adat. Tujuan penguatan kelembagaan ini secara umum adalah untuk mencapai derajat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar TNKL yang lebih tinggi dengan alokasi sumberdaya yang efisien dan efektif serta dapat diterima oleh BTNKL dan semua kelompok masyarakat secara adil. Masyarakat yang meningkat kesejahteraannya oleh karena pemberian bantuan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dari pemerintah akan meningkat pula kesadaran dan kepeduliannya untuk melestarikan TNKL.

Seiring berjalannya kegiatan pengelolaan TNKL sebagaimana tersebut jenis kegiatan lainnya memungkinkan untuk dilaksanakan. Jenis kegiatan tersebut akan berkembang seiring dengan pelaksanaan komunikasi yang intensif antar *stakeholders* inti dan pengelolaan adaptif sebagaimana prinsip-prinsip *co-management*.

KESIMPULAN

Stakeholders yang termasuk kategori *subjects* terdiri dari masyarakat Saga, Wologai Tengah dan petani kopi dalam kawasan, memerlukan pemberdayaan agar terlibat dalam pengambilan keputusan dan tindakan pengelolaan TNKL. *Stakeholders* yang termasuk kategori *key players* terdiri dari BTNKL, lembaga adat, kepala desa, Disbudpar dan Tananua Flores, perlu dilibatkan sebagai mitra dan perlu untuk mempertahankan komitmennya dalam pengelolaan TNKL. *Stakeholders* yang termasuk kategori *context setters* terdiri dari BAPPEDA, Dishutbun, Unflor, serta Swisscontact, perlu dikelola untuk dimintai saran pendapat (konsultasi) ataupun hanya sekedar penyampaian ijin dan pemberitahuan akan dilaksanakannya suatu kegiatan.

Strategi yang dikembangkan untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan *co-management* mengikuti rangkaian langkah-langkah kegiatan dengan prioritas sebagai berikut: a) pertemuan antar *stakeholders* inti yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan penyuluhan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat; b) pembentukan wadah/ forum *stakeholders* yang dilanjutkan dengan pembuatan aturan/ kesepakatan *stakeholders* dan sosialisasi program.

Dalam forum *stakeholders* yang terbentuk, perlu dibangun kesepakatan mengenai tingkat partisipasi

masing-masing *stakeholders* pada setiap tahapan pengelolaan sekaligus menentukan penanggung jawab kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Borrini-Feyerabend, G., M.T. Farvar, J.C. Nguingiri and V.A. Ndangang. 2000. Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning-by-Doing. GTZ and IUCN. Heidelberg.
- Colfer, C.J.P. *et al.* 1999. Panduan Pendamping Penilaian Dasar Kesejahteraan Manusia. Volume 6, Perangkat Kriteria dan Indikator. Center for International Forestry Research. Bogor.
- Marimin. 2005. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Grasindo. Jakarta.
- Reed, M.S., *et al.* 2009. Who's in and why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management* XXX (2009): 1 - 17.
- Rishi, P., S. Moghe, and B.K. Upadhyay. 2008. Analysis of Hierarchy of Needs and Motivational Strategies for Eco-Development Planning in Two National Park of India. *Resources, Conservation and Recycling* 52 (2008): 707 – 718.